

**PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(Kajian Tentang Profil, Permasalahan dan Pengembangan)**

Anita Yus *

Abstrak

Pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai dasar dalam perolehan sumber daya manusia bermutu. Bagi individu, pendidikan di usia dini sebagai dasar untuk pengembangan diri selanjutnya. Orang tua, pemerintah dan masyarakat sebagai pihak yang terkait dengan anak perlu menyadari pentingnya pendidikan bagi anak sejak usia dini. Lembaga pendidikan bagi anak usia dini, khususnya lembaga formal seperti TK dan RA serta non formal seperti Kelompok Bermain (KB) dan TPA perlu menata diri agar kondusif bagi perkembangan dan pengembangan diri anak. Perlu koordinasi antar badan penyelenggara yang saat ini dinaungi oleh Forum PAUD. Perlu pemahaman yang benar tentang hakikat dan karakteristik perkembangan anak, PAUD bermutu, permasalahan dan pengembangan PAUD di Indonesia. Diharapkan keberadaan PAUD benar-benar dapat membantu setiap individu menjadi warga negara yang berkualitas.

Kata kunci: anak, pendidikan, PAUD, profil PAUD, permasalahan, dan pengembangan

A. PENDAHULUAN

Pendidikan berlangsung dari sejak usia dini bahkan dari sejak dalam kandungan. Saat ini, pernyataan tersebut telah menjadi pemahaman bagi banyak orang tua dan masyarakat Indonesia. Pemahaman yang muncul telah membangun kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi anak sejak usia dini.

Munculnya kesadaran orang tua dan masyarakat akhirnya menjadi suatu kebutuhan akan pentingnya pendidikan bagi anak sejak usia dini. Kesadaran tersebut perlu disikapi secara positif dan proaktif oleh semua pihak yang berwenang untuk itu. Pemerintah melalui departemen-departemen yang berkaitan dengan anak,

berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Berkaitan dengan kompetensi psikomotorik, peserta didik dapat diminta untuk menilai kecakapan atau keterampilan yang telah dikuasainya sebagai hasil belajar berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan.

Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Keuntungan penggunaan teknik ini dalam penilaian di kelas antara lain sebagai berikut: a) dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, karena mereka diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri; b) peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya, karena ketika mereka melakukan penilaian, harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya; c) dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur, karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian.

Penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Oleh karena itu, penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: a) Menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai; b) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan; c) Merumuskan format penilaian, dapat berupa pedoman penskoran, daftar tanda cek, atau skala rentang; d) Meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri; e) Guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak, untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif, dan f) Menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak.

D. PENUTUP

Perlu dicatat bahwa tidak ada satu pun alat penilaian yang dapat mengumpulkan informasi prestasi dan kemajuan belajar peserta didik secara lengkap. Penilaian tunggal tidak cukup untuk memberikan gambaran/ informasi tentang kemampuan, keterampilan, pengetahuan dan sikap seseorang. Lagi pula, interpretasi hasil tes tidak mutlak dan abadi karena anak terus berkembang sesuai dengan pengalaman belajar yang dialaminya.

Kriteria penilaian karya peserta didik dapat dibahas guru dengan para peserta didik sebelum karya itu dikerjakan; dengan demikian peserta didik mengetahui patokan penilaian yang akan digunakan atau secara tidak langsung peserta didik terdorong agar

Langkah Pengembangan ... (Zulkifli Matondang, 169:182) 181

badan/perusahaan swasta, organisasi sosial, yayasan, kelompok maupun individual dapat memfasilitasi kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi anak sejak usia dini yang telah terbangun.

Sikap positif dan proaktif yang dimiliki oleh berbagai pihak, antara lain ditunjukkan dengan mendirikan atau membina lembaga pendidikan anak usia dini yang mudah dinikmati masyarakat. Upaya tersebut dapat dilihat melalui jumlah lembaga pendidikan anak usia dini yang terus bertambah.

Menyatunya kebutuhan orang tua dengan sikap positif dan proaktif masyarakat terhadap kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi pengelola. Pemerintah dan berbagai komponen masyarakat turut terlibat dalam penyediaan lembaga pendidikan anak usia dini. Penyelenggaraan dilakukan oleh departemen, perusahaan swasta, yayasan, organisasi sosial masyarakat, Individu, dan yang lainnya. Dengan partisipasi tersebut lembaga pendidikan anak usia dini tumbuh pesat. Pusat Data dan Informasi Pendidikan menunjukkan bahwa pada tahun 2003 ada sejumlah 13.225 unit lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan pada tahun 2005 menjadi 163.610 unit. Angka tersebut menunjukkan pertambahan yang sangat menakjubkan besarnya. Pertambahan tersebut diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Kedua, dilihat dari sisi orang tua yang memiliki anak usia dini. Semakin banyak orang tua yang berkenan memasukkan anak usia dininya (AUD) ke lembaga-lembaga PAUD. Saat anak memasuki usia empat tahun banyak orang tua yang segera memasukkannya ke Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan Pusat Data dan Informasi Pendidikan pada tahun 2003 menunjukkan bahwa sebanyak 543.726 orang anak usia dini yang memperoleh layanan pendidikan di lembaga PAUD dan pada tahun 2004 menjadi sebanyak 2.400.000 orang yang memperoleh pelayanan pendidikan usia dini. Perbedaan angka yang ditunjukkan sangat signifikan. Ada kecenderungan jumlah orang tua yang memasukkan anaknya ke lembaga PAUD terus meningkat terutama bila dilihat rata-rata angka kelahiran anak sekitar 4 juta setiap tahun. Data tersebut akan menyebabkan terjadinya pertambahan jumlah AUD yang akan membutuhkan layanan pendidikan semakin besar.

untuk penyelenggaraan PAUD perlu memperoleh perhatian se-
agar lembaga PAUD dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Tulisan ini mencoba mengkaji bagaimana sebenarnya hak
dan karakteristik pendidikan anak usia dini, penyelenggar
pendidikan yang dilihat dari penerapan manajemen, berba
permasalahan dalam penyelenggaraan PAUD, dan mengidentifik
upaya pengembangan PAUD bermutu.

B. PEMBAHASAN

1. Hakikat Anak dan Karakteristik Perkembangannya

Manusia dilahirkan dengan memiliki sejumlah bekal (poten:
Pernyataan tersebut sejalan dengan Fuller (2000) yang menyatak
bahwa setiap anak terlahir jenius, tetapi kita memupus kejenius
mereka dalam enam bulan pertama. Kalimat ini mengandung mak
bahwa terdapat ketidaksesuaian antara layanan yang diberikan deng
kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, sang
penting untuk memandang anak sebagai individu yang memili
potensi untuk berkembang dengan bantuan lingkungan.

Penelitian Fuller (2000), Gardner (2002), dan Samples (200
menunjukkan bahwa perkembangan di usia lahir sampai 8 tahu
merupakan masa yang sangat berarti bagi perkembangan berikutny
bahkan bagi kualitas diri di masa dewasa. Temuan terseb
mengisyaratkan bahwa pada masa anak usia dini sebagai fondasi ba
perkembangan diri dan kualitas individu.

Berbagai ahli pendidikan anak telah mengemukakan tentan
dimensi perkembangan yang harus dikembangkan sejak awal. Marti
(1995) mengemukakan empat hal utama yang perlu dikembangka
sejak awal pada diri anak, yaitu fisik, kognitif, bahasa, dan emosi/sen
Potensi aspek fisik, kognitif, dan bahasa telah dimiliki anak sebag
bawaan, lingkungan hanya menstimulasi dengan memberi stimula
yang tepat agar ketiganya berkembang maksimal. Ibarat tanamar
bibit telah ada selanjutnya bagaimana lingkungan menyemai di medi
tanam yang sesuai baik dilihat dari jenis tanah, pupuk kadar air da
lainnya dengan bibit tersebut sehingga bibit dapat tumbuh maksimal
Aspek emosi akan berkembang sejalan dengan perkembangan ketiga
aspek tersebut.

Penyediaan media tanam dan pemberian stimulan tersebutlah
yang dinyatakan sebagai proses pendidikan bagi anak usia dini.

Lahirnya Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memperkuat dan memperjelas keberadaan lembaga PAUD di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Masyarakat tidak perlu ragu karena PAUD di Indonesia telah memiliki kekuatan hukum. Dalam pasal 1 ayat 14 dan pasal 28 ayat 1 sampai dengan 6 mengemukakan definisi, pengelola dan penyelenggaraan serta kedudukan PAUD dalam satuan sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut menjadi acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan PAUD di Indonesia.

Berkaitan dengan anak, Samples (2002) mengemukakan bahwa otak bayi saat lahir belum sempurna, tetapi sudah mengandung jaringan syaraf sekitar 100 miliar sel syaraf aktif yang siap melakukan sambungan antar sel. Sambungan antar sel akan terjadi melalui pengalaman dari hari ke hari, yaitu melalui berbagai rangsangan seperti sentuhan, elusan, bernyanyi, bermain dan lainnya. Gardner (2002) mengemukakan bahwa hasil studi di bidang neorologi menunjukkan antara lain perkembangan intelektual telah mencapai 50% ketika anak berusia 4 tahun, 80% setelah anak berusia 18 tahun. Selanjutnya ia menyatakan bahwa usia 4 tahun merupakan masa emas (golden age) bagi perkembangan manusia yang datangnya hanya sekali selama hidup. Dua pendapat ahli yang dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa masa anak usia dini sangat penting bagi perkembangan masa depan setiap individu. Bila diabaikan maka terlambatlah upaya memaksimalkan perkembangan diri anak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa pesatnya pertumbuhan lembaga PAUD dan masa emas pertumbuhan dan perkembangan manusia pada usia dini perlu disikapi secara proaktif oleh berbagai kalangan yang bertanggung jawab atas pengembangan Sumber Daya manusia (SDM) Indonesia. Semua pihak, yaitu akademisi/ilmuan, praktisi, pengelola lembaga PAUD, Perguruan Tinggi dan pemerintah harus menaruh perhatian yang besar terhadap perkembangan lembaga PAUD di Indonesia. Perlu pemahaman yang benar tentang karakteristik perkembangan dan belajar anak, kegiatan belajar dan pelaksanaannya, setting lingkungan dan lainnya. Hal itu dimaksudkan agar layanan lembaga PAUD benar-benar berkontribusi terhadap kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan anak. Selain itu, kebingungan masyarakat yang disebabkan banyaknya penyelenggara (birokrasi) yang mengatur, aturan dan petunjuk yang dikeluarkan

Bronson (1995) dan Dockkett (1999) menegaskan bahwa stimulasi bagi pertumbuhan dan perkembangan anak dilakukan melalui bermain. Dalam bermain, anak akan melakukan berbagai aktivitas dengan senang dan mengasyikkan. Ia akan memegang, melempar, merasakan, mengamati, merasakan dan lainnya. Semua itu akan membentuk kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya.

Bermain memberi kesempatan kepada anak untuk mengasah semua potensi yang dimilikinya. Bronson (1995) menyatakan bahwa dalam bermain anak akan bergerak, meraba, berjalan, melompat, mengukur, memindah, mengamati, merasakan, mencoba dan melakukan berbagai aktivitas lainnya. Aktivitas tersebut sesuai dengan pandangan Montessori tentang anak sebagai individu yang unik yang memiliki karakteristik sebagai penjelajah yang aktif (*explorer*), penemu (*discoverer*) dan penggubah (*manipulator*) di lingkungan yang sekaligus akan mengembangkan kemampuan sosial. Kegiatan tersebut akan dilakukan berulang-ulang yang akhirnya menjadi suatu keterampilan. Melalui aktivitas tersebut anak akan memperoleh pemahaman, pengalaman dan perasaan akan sesuatu. Hal itu selain dapat menyentuh dimensi fisik, juga menyentuh aspek kognitif, bahasa dan emosi anak.

Undang-Undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur tentang semua hal yang berkaitan dengan pendidikan anak usia dini di Indonesia. Selain itu, banyak pakar yang memberi batasan tentang pendidikan anak usia dini. Pada umumnya menekankan bahwa inti dari pendidikan anak usia dini adalah membantu pencapaian perkembangan anak yang optimal.

2. Pendidikan Bermutu

Permasalahan mutu pendidikan di semua jenjang lembaga pendidikan (persekolahan) sampai saat ini masih merupakan hal yang menarik perhatian banyak orang. Banyak yang mengeluhkan tentang mutu pendidikan nasional yang saat ini masih rendah (Direktorat Dikdasmen, 2005). Pernyataan tersebut memang tidak berkaitan dengan penyelenggaraan PAUD. Namun, mengingat keberadaan lembaga PAUD yang masih relatif baru hal tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk mengantisipasi PAUD yang bermutu. Lembaga PAUD yang ada saat ini, seperti TK, RA, KB, TPA dan lainnya sangat

bervariasai. Baik dilihat dari komponen guru, sarana dan prasarana, model dan bentuk kegiatan belajar atau yang lainnya.

Membicarakan mutu sangat erat kaitannya dengan manajemen. Nawawi (2000) menyatakan bahwa manajemen adalah kemampuan pimpinan (manajer) dalam memberdayakan orang lain melalui kegiatan untuk menciptakan dan mengembangkan kerja sama dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Subagio (2000) mendefinisikan hakikat manajemen adalah bagaimana seorang pimpinan mampu memanfaatkan sumber daya yang dimiliki seoptimal mungkin, sehingga dapat mencapai tujuan organisasi. Selain itu, Harahap (2001) mendefinisikan manajemen merupakan seluruh kegiatan organisasi yang melibatkan penyusunan dan pencapaian tujuan, penilaian prestasi, dan pengembangan suatu filosofi dalam melaksanakan kegiatan yang memberi keyakinan terhadap keberadaan organisasi di tengah suatu sistem sosial dimana organisasi itu berada. Dari tiga batasan tersebut dapat dinyatakan bahwa manajemen berkaitan dengan orang dan kegiatan. Berarti dalam manajemen terdapat beberapa unsur, yaitu manajer/pemimpin, kegiatan dan sesuatu yang digunakan untuk mencapai tujuan. Manajer adalah orang yang mampu memimpin dan mengkoordinir semua kegiatan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan. Kegiatan tersebut antara lain penyusunan dan pencapaian tujuan, penilaian, dan pengembangan filosofi.

Dachnel (2002) mengemukakan bahwa manajemen memiliki fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), kepegawaian (*staffing*) pengarahan (*directing*) dan pengawasan (*controlling*), pengkoordinasian (*coordinating*), pelaporan (*reporting*) dan pembiayaan (*budgeting*). Fungsi-fungsi tersebut direalisasi ke dalam berbagai kegiatan sehingga organisasi berjalan lancar mencapai tujuan.

Tujuan yang dicapai tentunya tujuan yang bermutu. Secara umum, mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Menurut Reeta kualitas adalah suatu sistem atau proses untuk memenuhi kepercayaan masyarakat yang sekaligus dapat digunakan sebagai alat untuk kemajuan lembaga pendidikan. Sistem dan dan alat tersebut

oleh Depdiknas dirumuskan sebagai *input*, proses, dan *output* pendidikan.

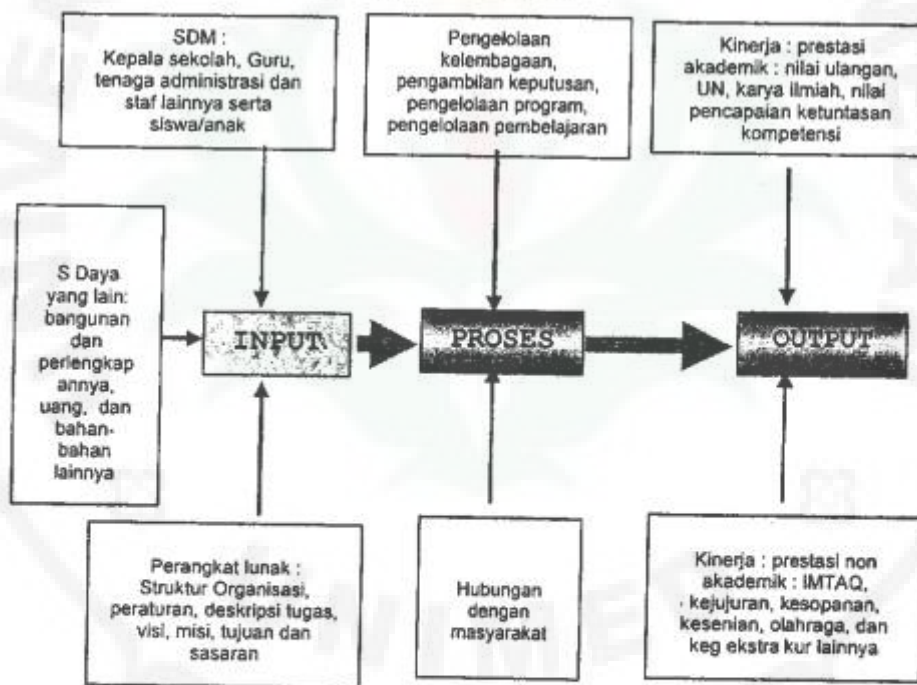
Input pendidikan sebagai segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Di dalamnya termasuk sumber daya, perangkat lunak serta harapan-harapan terhadap proses. Komponen yang termasuk di dalam input pendidikan adalah sumber daya manusia (kepala sekolah, guru, tenaga administrasi dan lainnya serta anak/siswa), sumber daya lainnya (peralatan, perlengkapan, uang, dan bahan-bahan lainnya), perangkat lunak seperti struktur organisasi, peraturan, deskripsi tugas, visi, misi, tujuan, dan sasaran yang ingin dicapai. Tinggi rendahnya mutu dapat ditentukan dari tingkat kesiapan input. Semakin tinggi tingkat kesiapan input makin tinggi pula mutu input tersebut.

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut *output*. Di lembaga pendidikan (secara mikro) proses yang dimaksud dapat berupa pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan (termasuk hubungan dengan Komite Sekolah yang merupakan gambaran keterlibatan masyarakat), pengelolaan program, pengelolaan pembelajaran, serta proses monitoring dan evaluasi. Di lembaga pendidikan (sekolah) pengelolaan pembelajaran menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan proses lainnya. Proses yang bermutu ditentukan melalui tingkat pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input yang dilakukan secara harmonis sehingga mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, mendorong munculnya aktivitas belajar dan benar-benar memberdayakan anak dalam berbagai kegiatan belajar.

Output pendidikan digambarkan sebagai kinerja. Kinerja adalah prestasi yang dihasilkan dari proses/perilaku lembaga. Kinerja dapat diukur dari kualitas, efektivitas, produktivitas efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja dan moral kerja. Secara khusus output pendidikan berkaitan dengan prestasi akademik dan non akademik (IMTAQ, kejujuran, kesopanan, kegiatan ekstra dan lain-lain).

Untuk lebih memudahkan menjelaskan keterkaitan antara komponen input, proses dan output sebagai upaya mengidentifikasi indikator mutu pendidikan digunakan bagan 1.

Penerapan manajemen dalam dunia pendidikan berkaitan dengan komponen-komponen yang telah dikemukakan dalam bagan 1. Fungsi perencanaan direalisasi dengan kegiatan mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan *input*, *proses* dan *output*. Kegiatan pengorganisasian dapat dirancang dalam bentuk penataan sistematika kerja dalam pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian tujuan. Fungsi kepegawaian berkenaan dengan kegiatan mengkoordinir orang-orang (termasuk menyeleksi dan menempatkan orang) yang terlibat dalam kegiatan untuk mencapai tujuan. Fungsi pengarahan dan pengawasan direalisasi dalam bentuk memfasilitasi dan mempengaruhi orang-orang agar mau berpartisipasi dalam kegiatan agar pencapaian tujuan berjalan lancar. Fungsi pengkoordinasian direalisasi dalam bentuk kegiatan pemberdayaan semua komponen dalam pencapaian tujuan. Kegiatan pelaporan lebih ditujukan untuk melihat *akuntabilitas* dan *sustainability* kegiatan. Fungsi pembiayaan direalisasi dalam bentuk kegiatan untuk menyediakan dana sebagai penunjang terlaksananya kegiatan sesuai rencana yang telah disusun.



Bagan 1 : Skema Keterkaitan komponen input, proses dan output pendidikan sebagai penentu mutu pendidikan (Depdiknas, 2005)

3. Manajemen PAUD di Indonesia

Soegeng (2002) menyatakan bahwa program pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang menentukan terbentuknya kepribadian anak ... dengan perlu mengikuti sifat bawaan anak, sehingga pengaruh yang diberikan kepada anak tidak bertentangan dengan kemauan dan bakat anak ... harus membantu perkembangan anak. Batasan ini memberi arah bagaimana pendidikan anak usia dini harus dilaksanakan. Ada hal-hal yang harus diperhatikan agar pendidikan yang diberikan benar-benar dapat membantu perkembangan anak. Sifat bawaan, kemauan dan bakat merupakan hal yang harus diperhatikan agar pencapaian perkembangan diri benar-benar maksimal.

Undang-Undang no 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menggariskan bahwa penyelenggaraan pendidikan bagi anak usia dini dilaksanakan melalui tiga jalur, yaitu sekolah, masyarakat dan keluarga. PAUD yang berada pada jalur sekolah dan masyarakat akan dibahas banyak dalam tulisan ini dibandingkan dengan yang berada pada jalur keluarga. Bukan berarti pendidikan yang berada pada jalur keluarga tidak penting bahkan sangat penting namun karena sifatnya individual bahasannya tidak dimasukkan dalam tulisan ini.

Kondisi yang ada di lapangan menunjukkan bahwa terdapat berbagai jenis dan bentuk lembaga pendidikan anak usia dini. Ada yang dikenal dengan Taman kanak-kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Raudhatul Athfal (RA), dan masih banyak yang lainnya. Ada yang berdasarkan keagamaan dan ada juga yang umum.

Bentuk dan jalur PAUD telah diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 28 menggariskan secara tegas bahwa: Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar; Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal; Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat; Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat; Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh

Birokrasi penyelenggaraan PAUD yang berlatar belakang umum di Indonesia saat ini berada di bawah naungan dua Direktorat Jenderal (Ditjen) Departemen Pendidikan nasional (Depdiknas). Penyelenggaraan PAUD jalur formal ada di bawah naungan Ditjen Pendidikan Dasar dan TK. Lembaga PAUD tersebut sudah banyak dikenal masyarakat karena memang lebih dahulu berkembang. Masyarakat mengenalnya dengan sebutan Taman Kanak-Kanak (TK). Sedang yang berada di jalur non formal berada di bawah naungan Ditjen PLSP. Lembaga ini dikenal dengan nama Kelompok Bermain, dan Taman Penitipan Anak (TPA), Pos PAUD, Satuan PAUD Sejenis. Lembaga dengan nama sejenis ada juga yang di bawah naungan Departemen Sosial (Depsos) bahkan lembaga ini lebih dahulu muncul dibandingkan dengan yang berada di bawah naungan Ditjen PLSP. Sementara yang berlatar belakang agama berada di bawah naungan Departemen Agama dan lembaga ini dikenal dengan nama Raudhatul Athfal (RA). Selain itu, masih ada lagi PAUD yang sebenarnya sejak awal sudah ada di masyarakat seperti kelompok bermain terintegrasi dengan posyandu, Bina Keluarga Balita (BKB), Taman Bermain, dan sekolah alam. Untuk lembaga tersebut pengelolaannya ada yang berada di bawah naungan Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri atau yang lainnya.

4. Permasalahan Dalam Penyelenggaraan PAUD di Indonesia

Keberadaan pasal 28 UU Sisdiknas memberikan dampak yang bervariasi. Pertama, pemahaman masyarakat atau bahkan pemerintah di daerah khususnya yang berkaitan dengan PAUD belum utuh. Kondisi ini menimbulkan konflik antar lembaga PAUD yang telah lebih dahulu ada dengan yang baru muncul, khususnya lembaga PAUD yang dikelola direktorat TK/SD dengan direktorat PLSP. Kata PAUD seakan-akan hanya menjadi lembaga PAUD yang dinaungi PLSP. TK/RA belum merasa menjadi bagian dari PAUD.

Kedua, seiring beragamnya penyelenggara dan berokrasi PAUD, muncul pula beragam lembaga layanan PAUD. Sebenarnya, kondisi tersebut positif. Tetapi, karena masih terbatasnya pemahaman terhadap PAUD sesuai dengan filosofi, konsep dan UU Sisdiknas menimbulkan kebingungan pada sebagian masyarakat bahkan juga sebagian penyelenggara. Hal ini, antara lain dapat dilihat dari nama yang digunakan untuk salah satu program yang dapat

lingkungan. Berdasarkan pasal 28 tersebut dapat dinyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dapat dilakukan pada tiga jalur. Masing-masing jalur memiliki bentuk dan jenis sendiri. Implikasi pasal 28 tersebut membuka peluang munculnya berbagai jenis dan bentuk lembaga pendidikan anak usia dini. Dari bentuk lembaga PAUD yang telah dikemukakan di atas ada yang dikenal lagi dengan nama Satuan PAUD sejenis (SPS), dan Pos PAUD. Dengan demikian terdapat variasi nama, program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Namun, semua itu perlu mengacu pada prinsip membantu perkembangan anak.

Saat ini ada beberapa jenis pendidikan anak usia dini yang melembaga yang dikenal masyarakat, yaitu Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Kelompok Bermain (KB), dan Taman Penitipan Anak (TPA). Yang belakangan muncul adalah Pos PAUD dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). TK dan RA merupakan lembaga PAUD yang paling dikenal masyarakat karena telah terlebih dahulu muncul. Sementara yang lainnya baru beberapa tahun belakangan ini muncul di masyarakat tetapi perkembangan sangat cepat. DISINI

Setiap lembaga PAUD dikelola oleh pengelola, antara lain ada yang dikelola oleh pemerintah, seperti Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Sosial, Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Departemen Informasi dan Komunikasi, Menteri Negara Peranan Wanita, dan Departemen Luar Negeri di lingkungan KBRI. Selain itu, ada PAUD yang dikelola oleh organisasi sosial seperti Aisyiah dengan nama TK Aisyiah Bustanul Athfal (TK ABA), perusahaan BUMN dan swasta, yayasan serta individu.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, dapat dinyatakan bahwa saat ini penyelenggara lembaga PAUD sangat bervariasi. Namun, dari sisi bentuk dapat diidentifikasi sebagai TK, RA, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, Taman Bermain, Pos PAUD, Satuan PAUD Sejenis, Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al Qur'an, dan Sekolah Minggu. Dari isi program kegiatan belajar ada yang umum, ada yang berafiliasi agama, yaitu Islam, Kristen, Budha, dan Hindu. Yang perlu diingat adalah apapun nama dan bentuk PAUD tetap harus mengacu pada konsep dasar, yaitu membantu perkembangan anak. Bila hal itu terpenuhi maka lembaga tersebut dapat dinyatakan sebagai lembaga PAUD.

membingungkan, misalnya Pos PAUD, Satuan PAUD Sejenis, atau penyelenggara atau guru yang menyatakan 'ini TK bukan PAUD'.

Ketiga, ada organisasi yang berkaitan dengan PAUD, yaitu GOPTKI dan IGTKI. Dua organisasi ini menjadi bagian dari TK. Muncul Himpaudi yaitu organisasi yang berkaitan dengan PAUD. Belum ada sistem atau garis yang membuat GOPTKI dan IGTKI berhubungan dengan Himpaudi. Bahkan diduga ada indikator yang menunjukkan terjadi konflik organisasi antara GOPTKI dan IGTKI dengan Himpaudi. Walau sebenarnya sebagian orang yang terlibat dalam organisasi GOPTKI dan IGTKI juga terlibat di Himpaudi.

Keempat, gencarnya sosialisasi pentingnya PAUD dan persyaratan pendirian yang sederhana menjadikan lembaga PAUD tumbuh menjamur di lingkungan masyarakat khususnya yang berada pada jalur nonformal. Lembaga yang ada tersebut sangat bervariasi. Kalau dinyatakan dalam skala sepuluh, lembaga tersebut berada dalam rentang 1 sampai 10 baik dari sisi kualitas guru/pendidik/pamong dan kordinator/pimpinan, sarana dan prasarana, pengelolaan pembelajaran, hubungan masyarakat ataupun kinerja lembaga. Kondisi tersebut terbentuk karena dispensasi yang diberikan dalam pendirian khususnya dalam rangka memenuhi target kuantitas. Saat ini masih sekitar 5% guru/pendidikan yang berlatar belakang pendidikan tinggi yang menjadi syarat untuk menjadi guru/pendidik. Ada kebijakan tentang standar antara kualifikasi tutor/pamong yaitu berpendidikan SMA ditambah dengan pelatihan tentang PAUD. Tetapi kebijakan tersebut di lapangan belum dimaknai sebagaimana yang seharusnya. Kebijakan tersebut oleh banyak pendidik/pamong PAUD dianggap persyaratan minimal bukan sebagai persyaratan sementara yang harus ditingkatkan. Kondisi seperti ini dapat berdampak negatif terhadap perilaku guru/pendidik terutama dalam peningkatan kualifikasi yang akhirnya berdampak terhadap upaya membantu pertumbuhan dan perkembangan anak. Penelitian yang dilakukan BNSP tentang pemahaman guru yang berkaitan dengan kompetensi guru di enam daerah menunjukkan bahwa para sekitar 60% guru menyatakan bahwa kompetensi paedagogik benar-benar diperlukan, kompetensi kepribadian 72%, kompetensi sosial 52% dan kompetensi profesional 46%. Hal ini tentunya akan mempengaruhi perilaku guru mengembangkan kompetensinya. Kalau dilihat dari komponen

lainnya, seperti sarana dan program juga kebanyakan masih sangat jauh. Masih sekitar 15% yang memenuhi kriteria yang memadai.

Pelatihan dan pendidikan terus dilakukan. Berbagai pelatihan dilakukan dengan menggunakan berbagai materi dan bentuk kegiatan. Namun, sampai saat ini belum ada evaluasi tentang dampak, pelatihan terhadap kualifikasi guru dan kualitas penyelenggaraan pembelajaran. Ada kecenderungan yang menunjukkan bahwa sebagian pelatihan belum dapat membentuk kemampuan sebagian besar pesertanya. Hal ini dapat disebabkan, antara lain oleh keterbatasan kemampuan dan keterampilan nara sumber, waktu yang disediakan sangat terbatas, seperti yang seharusnya 40 jam dipangkas menjadi 20 jam sehingga terjadi pemadatan materi, materi yang diberikan belum dimasukkan menjadi bagian dari kegiatan belajar sehari-hari dan lainnya.

Dari sisi kinerja lembaga PAUD tentunya juga perlu dipertanyakan walaupun penelitian untuk ini belum ada. Tetapi, bila komponen-komponen yang mempengaruhi kinerja masih seperti yang telah dikemukakan di atas maka dapat diduga kinerja juga masih belum memenuhi harapan terutama dilihat dari sisi kebutuhan perkembangan anak.

5. Upaya Pengembangan PAUD Bermutu.

Pemerintah menyikapi beragamnya lembaga PAUD di masyarakat dengan lebih memfasilitasi agar setiap lembaga menjalankan PAUD lebih berkualitas. Telah dilakukan koordinasi antara lembaga penanggung jawab dan penyelenggara agar program yang diberikan benar-benar membantu perkembangan anak. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya kebingungan masyarakat terhadap keberadaan lembaga PAUD. Seperti yang telah dikemukakan di atas, pemerintah telah memfasilitasi dengan menyediakan wadah untuk berbagai kegiatan pembenahan lembaga PAUD.

Kordinasi dilakukan oleh dan dengan berbagai cara. Pertama, dibentuknya Konsorsium PAUD. Konsorsium PAUD adalah sekelompok orang dari berbagai keahlian yang membantu Departemen Pendidikan Nasional dalam hal Direktorat PAUD untuk memikirkan, menelaah, dan merumuskan program pembinaan PAUD yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, ada yang dikenal dengan nama

Forum PAUD dan Forum Komunikasi Pendidikan Anak Indonesia (FKPAI). Forum tersebut mempunyai tugas utama untuk selalu mengkordinir pelaksanaan PAUD di masyarakat. Melalui pertemuan yang dilakukan forum dapat didiskusikan berbagai hal, seperti masalah dan pemecahan yang berkaitan dengan pelaksanaan layanan PAUD. Selain itu, forum dapat berperan sebagai fasilitator dan mediator pemerintah dalam memahami berbagai permasalahan pelaksanaan layanan PAUD di masyarakat.

Kedua, banyaknya birokrasi dan karakteristik PAUD di lingkungan masyarakat membutuhkan reorientasi manajemen dari mulai tingkat atas hingga ke bawah (pelaksana PAUD seperti TK, KB dan yang lainnya). Upaya pemerintah dengan melakukan kordinasi di tingkat nasional merupakan hal yang positif. Bentuk nyata kordinasi tersebut antara lain adanya tim kerja yang menghasilkan buku data dan program yang dikenal dengan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015 yang dihasilkan pada tahun 2004. Program nasional tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun dan mengembangkan PAUD di tingkat nasional dan kabupaten/kota bahkan sampai ke desa-desa.

Ketiga, saat ini ada beberapa organisasi yang berkaitan dengan PAUD, yaitu GOPTKI, IGKTI, dan Himpaudi. Ketiganya memiliki tanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan PAUD di Indonesia. GOPTKI dan IGTKI saling berkaitan, tetapi dengan Himpaudi belum ada hubungan organisasi. Sebenarnya sebagian pengurus GOPTKI dan IGTKI menjadi pengurus juga di Himpaudi. Tetapi, belum ada sistem yang mengatur GOPTKI dan IGTKI berkaitan dengan Himpaudi. Sebenarnya ketiganya dapat berhubungan di bawah naungan PAUD.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa hal penting yang perlu dilakukan untuk memantapkan FKPAI dan serta kordinasi antar birokrasi dan organisasi yang berkaitan dengan PAUD dan penyelenggara adalah melakukan sosialisasi akan keberadaan kordinasi PAUD di bawah Menko Kesra dan PNBAI hingga sampai ke daerah-daerah. Sosialisasi sangat penting dilakukan karena bermanfaat untuk menegaskan bahwa semua lembaga PAUD yang ada pada dasarnya adalah sama, yaitu untuk membantu perkembangan anak. Sebenarnya, pasal 28 menjadi payung semua lembaga PAUD, yaitu TK, RA, KB, TPA, dan lainnya. Dengan demikian kalau

menyebutkan kata PAUD akan terbayang semua lembaga itu termasuk TK dan RA. Selain itu, sosialisasi berguna untuk menyatukan persepsi tentang keberadaan dan pentingnya PAUD yang saat ini masih beragam.

Program sosialisasi dapat memberi kekuatan dan kejelasan kepada masyarakat yang telah dan ingin menyelenggarakan pendidikan anak usia dini. Mereka tanpa ragu-ragu dapat menentukan karakteristik lembaga dengan mengacu kepada rambu-rambu yang dikeluarkan masing-masing departemen/direktorat pengelola. Rambu-rambu yang digunakan sekaligus sebagai tanda bahwa lembaga yang didirikan berinduk kepada badan tersebut.

National Association For Education of Young Children-NAEYC (2004) menggariskan bahwa lembaga pendidikan anak usia dini terdiri dari guru, anak, keluarga, kurikulum, pembelajaran, kesehatan, lingkungan fisik, serta kepemimpinan dan manajemen. Komponen-komponen tersebut sekaligus dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan mutu penyelenggaraan PAUD.

Acuan yang dikeluarkan Depdiknas cq Ditjen PAUD, Pendidikan Dasar dan TK, Depag, dan Depsos tentang penyelenggaraan PAUD bervariasi. Namun, komponen utama yang terdapat di dalamnya sama dengan yang telah dikemukakan oleh NAEYC 2004. Hal tersebut terjadi karena semua penyelenggara telah sepakat bahwa hakikat PAUD adalah membantu pencapaian perkembangan anak yang maksimal.

Berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, serta teori perkembangan anak, manajemen, dan pendidikan bermutu yang telah dikemukakan dapat dinyatakan bahwa perlu reorientasi manajemen PAUD ke depan. Reorientasi dilakukan dengan memantapkan forum dan koordinasi yang telah dimulai pada tingkat nasional dan diteruskan sampai ke tingkat pelaksana pendidikan terkecil (TK atau nama lainnya). Selain itu, harus diidentifikasi indikator PAUD bermutu yang relatif sama. Hal ini dimaksudkan untuk tidak membingungkan masyarakat dan pelaksana pendidikan. Indikator yang dimaksud dikembangkan berdasarkan beberapa buku panduan penyelenggaraan beberapa jenis PAUD yang dikeluarkan Depdiknas, Depag dan Depsos serta mengacu kepada konsep yang dikemukakan NAEYC 2004. Indikator yang dimaksud terdiri dari:

DAFTAR BACAAN

- Badan Standar Nasional Pendidikan. 2007. *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*. Jakarta
- Bronson, Martha, B., *The Right stuff for children selecting play materials to support development*, Washington DC: National Association for the education of young children, 1995)
- Dockett, S. & Reer, M. 1999. *Play and Pedagogy in Early Childhood: Bending the Rules*. Harcourt.
- Feeney, S., Christensen, D., & Moravcik, A. 2006. *Who am I in th Lives of Children 7th ed*. New Jersey: Pearson Prentice Hall, Inc.
- Gardner, Howard, 2002. *Multiple intelligence*. New York: Basic Books Harper Collins Publishing. Inc
- Hadari, Nawawi, 2000. *Manajemen Strategik*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Harahap, Syofyan Syafri 2001. *Sistem Pengawasan Manajemen*, Jakarta: Quantum.
- Kamar, Dachnel. 2002. *Administrasi Pendidikan Teori dan Praktek* (Tidak dipublikasikan)
- NAEYC 's standards for program. 2004. *Preparing Early Childhood Professionals*.
- Santoso, Soengeng, 2002. *Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: Citra Pendidikan,
- Samples, Bob, 2002, *Revolusi belajar untuk anak panduan belajar sambil bermain untuk membuka pikiran anak-anak anda*, Indonesian translation copyright, Bandung : Penerbit PT Kaifa
- Subagio, Atmodwiro, 2000. *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Ardadizya Jaya.

* Dr. Anita Yus, M.Pd. adalah dosen PAUD FIP Unimed